



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURDIANA, SE, MM**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE
NIP. 19661028 199203 2 010

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASSET DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



NURDIANA, SE, MM
NIP. 19731202 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya pencapaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TJHP)	- TJHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	-	60
Sub Keg.	Terlaksananya Penyedikan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	125 Orang/Bulan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penilaian dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	500 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	12 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	15 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Pengelolaan dan Persiapan Bahas Tanggapan Pemeriksaan	- Jumlah Dokumen Bahas Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	5 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelesaian Laporan Keuangan Balances/ Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Balances/ Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyelesaian Laporan Keuangan Balances/Triwulan/Semester SKPD	-	14 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Pengumpulan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	1 Dokumen
Keg.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	14 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	10 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Perlindungan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	2 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penilaianan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Penilaianan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan
Keg.	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & jasa secara elektronik Perangkat Daerah	- INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	-	60
Sub Keg.	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit
Keg.	Terlaksananya Peneliharaan Barang Milik Daerah Peningkang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Peneliharaan Barang Milik Daerah Peningkang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelidikan Jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan dan Pajak Kendaraan Penyegepan Dinas atau Kendaraan Dinas	- Jumlah Kendaraan Peneliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	35 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	110 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diambil替換	-	1 Unit

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp14,430,057,683	
Sub Keg.	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp12,306,919,633	
Sub Keg.	2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp1,181,400,000	
	3 Pelaksanaan Penetapan hasil dan Penetapan Verifikasi Keuangan SKPD	Rp554,017,900	
	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuisisi SKPD	Rp125,825,200	
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp49,787,950	
	6 Pengelolaan dan Penyaluran Bahan Tanggapan Bencana	Rp98,649,000	
	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Telahan Tidak Lulus Sertifikat SKPD	Rp59,528,500	
	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp53,929,500	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp255,093,700	
Sub Keg.	1 Pengaraman Barang Milik Daerah SKPD	Rp90,340,000	
	2 Penilaihan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp68,316,000	
	3 Reklasifikasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp32,599,700	
	4 Penilaian barang Milik Daerah pada SKPD	Rp63,838,000	
	Pengadaman Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp43,747,400	
Sub Keg.	1 Pengadaman Penilaian dan Meitis Lainnya	Rp43,747,400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp464,524,300	
Sub Keg.	1 Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemongong Dinas atau Kehendak Dinas	Rp272,784,300	
Sub Keg.	2 Pemeliharaan Penilaian dan Meitis Lainnya	Rp133,740,000	
Sub Keg.	3 Pemeliharaan/Evaluasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp58,000,000	

Pala, 20 Februari 2024

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset

NURDIANA, SE, MM
Nip. 19731202 200212 2 004





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROY EDWARD KUMAAT, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE
NIP. 19661028 199203 2 010

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


ROY EDWARD KUMAAT, SE
NIP. 19820321 200904 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERBAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	- NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelesaian Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelesaian Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelesaian Dokumen Persubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Persubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelesaian Dokumen Persubahan RKA-SKPD	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelesaian DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelesaian Dokumen DPA-SKPD	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelesaian Persubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Persubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelesaian Dokumen Persubahan DPA-SKPD	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Rp658,468,300	
Sub Keg.	1. Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp528,414,000	
	2. Koordinasi dan Penyelesaian Dokumen RKA-SKPD	Rp12,825,000	
	3. Koordinasi dan Penyelesaian Dokumen Persubahan RKA-SKPD	Rp6,050,000	
	4. Koordinasi dan Penyelesaian DPA-SKPD	Rp5,725,100	
	5. Koordinasi dan Penyelesaian Persubahan DPA-SKPD	Rp3,750,200	
	6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp101,696,000	

Pulu, 20 Februari 2024



PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program


ROY EDWARD KUMAAT, SE
 Nip. 19820321 200904 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

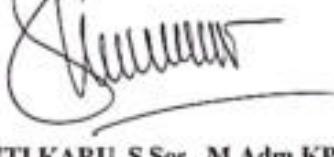
Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE
NIP. 19661028 199203 2 010

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP
NIP. 19710906 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	- INDEKS PROFESSIONAL ASN PERANGKAT	-	60
Sub Keg.	Terlaksananya Pendidikan dan Pengembangan Administrasi Kepengawaiann	- Jumlah Dokumen Pendektan dan Pengelahan Administrasi Kepengawaiann	-	4 dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Penilaian Tingkat dan Fungsinya	- Jumlah Pegawai Binaan yang Mengikuti Pelatihan yang Mengikuti Penilaian Tingkat dan Fungsinya	-	18 orang
Sub Keg.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	42 orang
Keg.	Meningkatnya kualitas reformasi tata kelola perangkat daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepergawainan	-	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelidikan Komponen Instansi Listrik/Tenaga dan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disidik	-	4 paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelidikan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disidik	-	4 paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelidikan Bantuan Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Paket Bantuan Cetakan dan Penggandaan yang Disidik	-	4 paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelidikan Bahan Bocoran dan Terserabut Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bocoran dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disidik	-	12 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi SKPD	-	76 Laporan
Keg.	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	- INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	-	60
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	- INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	-	60
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	- TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	-	62
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	-	13 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disidik	-	12 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disidik	-	4 Laporan

	Kegiatan	Budget	Keterangan
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp172,493,100	
Sub Keg.	1 Pendidikan dan Pengelahan Administrasi Keuangan	Rp58,381,100	
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pajak Berdasarkan Tingkat dan Fungsinya	Rp107,512,000	
	3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp6,600,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp389,828,840	
Sub Keg.	1 Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10,060,830	
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp14,204,710	
	3 Penyediaan Bantuan Cetakan dan Penggandaan	Rp39,381,400	
	4 Penyelidikan Bahan Bocoran dan Peraturan Perundang-undangan	Rp33,600,000	
	5 Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi SKPD	Rp192,581,900	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persestatalan Daerah	Rp586,966,820	
Sub Keg.	1 Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp300,000	
Sub Keg.	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp421,405,200	
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp165,261,620	

Patu, 20 Februari 2024



PIAHAK KEDUA
Kepala Sub Bagian Kepengawainan Dan Umum

ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP.
Nip. 19710906 199303 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDRIYANI, SE**

Jabatan : Kepala Tata Usaha UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**

Jabatan : Kepala UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

PIHAK PERTAMA,

KEPALA TATA USAHA UPT PENGAWASAN
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



INDRIYANI, SE
NIP. 19711018 199202 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			(1)	(2)
Keg.	Meningkatnya penyelusian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLPHP)	- TLPHP BPK DAN APBP PERANGKAT DAERAH	-	60
Sub Keg.	Terlaksananya Penyidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Birok Penyidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dokumen
Keg.	Meningkatnya kualitas referensi hukum perangkat Daerah	- Jumlah dokumen ketertiban dan kepegawaian	-	1 dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyidikan perlakuan dan perlengkapan kantor	- Jumlah Paket perlakuan dan perlengkapan kantor yang disusulkan	-	1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyidikan Bantuan Cetak dan Penggadaan	- Jumlah Paket Bantuan Cetak dan Penggadaan yang Disusulkan	-	1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan
Keg.	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	- INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	-	60
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	- INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	-	60
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	- TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	-	62
Sub Keg.	Terlaksananya Penyidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diumpan	-	1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyidikan Jasa pelayanan umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyidikan Jasa pelayanan umum kantor yang disusulkan	-	1 Laporan
Keg.	Terlaksananya Penelitian barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Penelitian barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyidikan Jasa Penelitian, Biaya Penelitian dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Penelitian Perlakuan dan Mesin Laundry	- Jumlah Perlakuan dan Mesin Laundry yang Dipelihara	-	5 Unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 251,168,800	
Sub Keg. Penyidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 251,160,000	
Sub Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 65,729,788	
Sub Keg. Penyidikan perlakuan dan perlengkapan kantor	Rp 21,953,520	
Sub Keg. Penyidikan Bantuan Cetak dan Penggadaan	Rp 8,313,950	
Sub Keg. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 35,462,000	
Penyidikan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 46,956,800	
Sub Keg. Penyidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 45,456,800	
Sub Keg. Penyidikan Jasa pelayanan umum Kantor	Rp 1,500,000	
Sub Keg. Penelitian barang Milik Daerah	Rp 43,196,900	
Sub Keg. Penelitian Penelitian, Biaya Penelitian dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 30,856,900	
Sub Keg. Penelitian Perlakuan dan Mesin Laundry	Rp 12,340,000	

Pah, 20 Februari 2024



PIHAK KEDUA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Pelaksanaan Teknis Pengawasan dan Perlindungan
Konsumen

INDRIYANI, SE
Nip. 19711018 199302 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURWATA,SE
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDDY SUARMAN, SE., MM
Jabatan : Kepala UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PEMBERDAYAAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PURWATA,SE
NIP. 19710610 199103 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		(1)	(2)	
Keg.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase Pengaduan Konsumen yang terselesaikan	-
Sub Keg.	Terlaksananya Pemberdayaan Konsumen dan Kelangsungan Perlindungan Konsumen	-	Jumlah Badan Pengelola Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSEK) yang Aktif	-
Sub Keg.	Terlaksananya Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlisungan Konsumen	-	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Dibina	-
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinergisitas Penerapan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	-	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	-

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp996,504,850	
Sub Keg.		
1 Pemberdayaan Konsumen dan Kelangsungan Perlindungan Konsumen	Rp875,599,950	
2 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Rp45,305,000	
3 Koordinasi dan Sinergisitas Penerapan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Rp75,599,900	

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Pelaksanaan Teknis
Pengawasan Dan Perlindungan
Konsumen



PURWATA,SE
Nip. 19710610 199103 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDWAN NALLSE
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga Dan Penegakkan Hukum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDDY SUARMAN, SE., MM
Jabatan : Kepala UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN
JASA, TERTIB, NIAGA DAN PENEGAKKAN
HUKUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

RIDWAN NALLSE
NIP. 19780531 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)		
Keg.	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase barang beredar yang dianasi yang telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	- 100
Sub Keg.	Tertibkananya Pengawasan Barang Beredar dan/Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	-	Jumlah Laporan Ilmi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Dianasi	- 2
Sub Keg.	Terlaksananya Pendidikan Penegakan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	-	Jumlah Kasus yang Disugesti	- 8

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp198,914,800	
Sub Keg.	1. Meningkatkan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Rp119,999,950	
	2. Fasilitasi Penegakan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Rp78,914,850	

Pala, 20 Februari 2024



PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga
Dan Penegakkan Hukum

RIDWAN NALLSE
Nip. 19780531 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIDYAWATI, S.Pt**
Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOLVANITA LADJIJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

NOLVANITA LADJIJI, S. Ag, M.M
NIP. 19750601 200701 2 029

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WIDYAWATI, S.Pt
NIP. 19750607 200112 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya pelaksanaan Pengujian mutu komoditi, sertifikasi mutu produk dan kalibrasi alat UPTD PSMB	- Meningkatnya Pengujian mutu komoditi, sertifikasi mutu produk dan kalibrasi alat UPTD PSMB	-	837 sertifikat
Sub Keg.	Terlaksananya Penantauan Mutu Komoditi	- Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	-	2
Sub Keg.	Terlaksananya Pengembangan Layanan Pengujian	- Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	-	489

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp406.332.715,00	
Sub Keg. 1 Penantauan Mutu Produk	Rp105.576.825	
2 Pengembangan Layanan Pengujian	Rp300.755.890	

Pala, 20 Februari 2024

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

WIDYAWATI, S.Pt
Nip. 19750607 200112 2 004





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WULANDARI AGUSTINA, S.Sos., M.A.P**
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOLVANITA LADJIJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

S. NOLVANITA LADJIJI S.Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPT PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WULANDARI AGUSTINA, S.Sos., M.A.P NIP.
19790319 200903 2 001

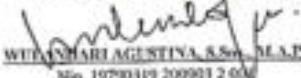
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya penerapan Tindaklanjut Hasil Penilaian (TLHP)	- TLHP SPK DAN APBK PERANGKAT DAERAH	-	60
Sub Keg.	Turikannya Perpaduan administrasi pelaksanaan tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 dokumen
Keg.	Meningkatnya kualitas referensi buku dan perangkat Daerah	- Jumlah dokumen literatur dan kepegawaian	-	1 dokumen
Sub Keg.	Turikannya Perpaduan Komponen Instansi Lintas Pemerintahan Bantuan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instansi Lintas-Pemerintahan Bantuan Kantor yang Disosialisasi	-	3 paket
Sub Keg.	Turikannya Perpaduan Pemeliharaan dan Pengelolaan Kantor	- Jumlah Paket Perilaku dan Pengelolaan Kantor yang Disosialisasi	-	1 paket
Sub Keg.	Turikannya Perpaduan Bantuan dan Pengabdian	- Jumlah Paket Bantuan dan Pengabdian yang Disosialisasi	-	1 paket
Sub Keg.	Turikannya Pengelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Pengelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan
Keg.	Meningkatnya penerapan layanan pemerintahan bantuan & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	- INDEKS TATA KELOLA PBI PERANGKAT DAERAH	-	60
Sub Keg.	Turikannya pengelolaan perlakuan dan tindakan lainnya	- Jumlah Unit perlakuan dan tindakan yang dilakukan	-	23 Unit
Keg.	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	- INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	-	60
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	- INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	-	60
	Meningkatnya pengawasan keuangan internal perangkat daerah	- TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	-	62
Sub Keg.	Turikannya Penerapan Jasa Suntik Masyarakat	- Jumlah Laporan Penerapan Jasa Suntik Masyarakat	-	1 Laporan
Sub Keg.	Turikannya Penerapan Jasa Kesehatan, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penerapan Jasa Kesehatan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disosialisasi	-	1 Laporan
Sub Keg.	Turikannya Penerapan Jasa Pelepasan Uang Kantor	- Jumlah Laporan Penerapan Jasa Pelepasan Uang Kantor yang Disosialisasi	-	1 Laporan
Keg.	Turikannya Penerapan Bantuan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Jspres Penerapan Bantuan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan
Sub Keg.	Turikannya Penerapan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kantoran	- Jumlah Kondisi Pemeliharaan Dinas atau Kantoran Dinas Adilas yang Dipelihara dan	-	4 Unit
Sub Keg.	Turikannya Penerapan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kondisi Dinas Operasional atau Layanan	- Jumlah Kantoran Dinas Operasional atau Layanan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	-	4 Unit
Sub Keg.	Turikannya Penerapan Perlakuan dan Misin Lainnya	- Jumlah Perlakuan dan Misin Lainnya yang Dipelihara	-	7 Unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp331,320,860	
Sub Keg. Penerapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp31,320,000	
Administrasi Uraian Perangkat Daerah	Rp177,610,256	
Sub Keg. Penerapan Komponen Instansi Lintas Pemerintahan Bantuan Kantor	Rp3,237,246	
Sub Keg. Penerapan Perlakuan dan Pengelolaan	Rp51,150,160	
Sub Keg. Penerapan Barang Catalan dan Pengabdian	Rp25,614,850	
Sub Keg. Pengelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp97,608,000	
Pengabdian bantuan adilas daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp2,260,049,730	
Sub Keg. Turikannya pengelolaan perlakuan dan tindakan lainnya	Rp2,260,049,730	
Penerapan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp19,039,648	
Sub Keg. Penerapan Jasa Suntik Masyarakat	Rp4,993,000	

Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp168,737,496
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penitribuan Barang Milik Birokrat Peningkatan Urvutan Penitributan Birokrat	Rp45,304,152
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Penitribuan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemerintah Dinas atau Kondisioner Dikmas Admistrasi	Rp242,894,009
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Penitribuan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lepasang	Rp41,050,000
Sub Keg.	Penitribuan Peralatan dan Alat-alat Lainnya	Rp187,354,000



Palm, 20 Februari 2024
PIHLAIK PETAMA
 Kepala Sub Bagian Tata Kelola
 UPT Pengeluaran Sertifikat Masa Barang

 Nip. 19790319 200903 2 039



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LEVIANA MANGOPO, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Kalibrasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOLVANITA LADJIJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KALIBRASI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH



NOLVANITA LADJIJI, S. Ag, M.M
NIP. 15130801 200701 2 029



LEVIANA MANGOPO, ST
NIP. 19851031 201101 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya pelaksanaan Pengujian mutu komoditi, sertifikasi mutu produk dan kalibrasi alat UPTD PSMB	Meningkatnya Pengujian mutu komoditi, sertifikasi mutu produk dan kalibrasi alat UPTD PSMB	-	837 sertifikat
Sub Keg.	Terlaksananya Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	-	2
Sub Keg.	Terlaksananya Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	-	348

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Sekolah Daerah Kabupaten/Kota	Rp160,570,000.00	
Sub Keg. 1 Pengembangan Layanan Sertifikasi	Rp69,321,750	
2 Pengembangan Layanan Kalibrasi	Rp91,249,150	

Pala, 20 Februari 2024



PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Kalibrasi


LEVIANA MANGOPO, ST
Nip. 19851031 201101 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VERADIAN SAPHIRE,SP,MM**
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**
Jabatan : Kepala UPT Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
PRODUK PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

A handwritten signature in black ink that reads "VERADIAN SAPHIRE,SP,MM". Below the signature is the text "NIP. 19750319 199603 2 001".

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya Fasilitasi Layanan /Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	- Presentase Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	-	100
Sub Keg.	Terlaksananya Jasa Layanan dan Pembinaan bagi Pelaku IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan serta Jumlah Penerimaan PAD UPT P2PK	Jumlah Layanan dan Pembinaan bagi Pelaku IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	-	104%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penyusutan, Perserapan, dan Evaluasi Rencana Pengembangan Industri Provinsi	Rp361,057,540,00	
Sub Keg. 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp361,057,540	

Patu, 20 Februari 2024



PIHAK PERTAMA
 Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

S/VS
 VERADJAN SAPHIRE, SP, MM
 Nip. 19790319 199603 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDWAN, M, ST, MM
Jabatan : Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAPIT TOLLA,SE
Jabatan : Kepala UPT Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



HAPIT TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK
PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RIDWAN, M, ST, MM
NIP. 19680721 201112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

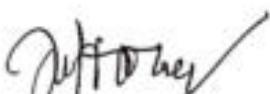
No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			(1)	(2)
Keg.	Meningkatnya Fasilitasi Layanan/Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	- Presentase Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	-	100
Sub Keg.	Terlaksananya Jasa Layanan dan Pembinaan bagi Pelaku IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan serta Adanya Penerapan PAID UPT P2IPK	- Jumlah Layanan dan Pembinaan bagi Pelaku IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	-	1044

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Sub Keg.	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi, Sinergi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Perma Serta Masyarakat	Rp1,368,668,588	
		Rp1,368,668,588	

Pale, 20 Februari 2024



PIHAK PETAMA
 Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah


RIDWAN ALST. MM
 Nip. 19680721 201112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE**

Jabatan : Kepala Tata Usaha UPT Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HAPIT TOLLA, SE**

Jabatan : Kepala UPT Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,

KEPALA UPT PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



HAPIT TOLLA, SE

NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA,

KEPALA TATA USAHA UPT
PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN
DAN KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE

NIP. 19780632 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya penyelatan Tindaklanjut Hasil Penilaianan (TJHP)	- TJHP RPKN DAN APP PERANGKAT DAERAH	- 60
Sub Keg.	Terlaksananya Peredam administrasi pelaksanaan tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- 1 Dokumen
Keg.	Meningkatnya kualitas reformasi berbasis perangkat Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelatan Komponen Instansi Lurik/Pemerintahan Daerah	- Jumlah Paket Komponen Instansi Lurik/Pemerintah Daerah Kantor yang Diselidiki	- 2 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelatan Peraturan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Penilaian dan Perlengkapan Kantor yang Diselidiki	- 2 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelatan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diselidiki	- 1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Pendidikan kerjajangan tata	- Jumlah Laporan Penyelidikan rujuk koordinasi dan Laporan hasil SKPD	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelidikan Rapot Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penitenti Kerjajangan Tata	- 1 Laporan
Keg.	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	- INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	- 60
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	- INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	- 60
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	- TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	- 62
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyelatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diselidiki	- 2 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyelatan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diselidiki	- 1 Laporan
Keg.	Terlaksananya Penelihuran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Penelihuran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelatan Jasa Penelihuran, Biaya Penelihuran dan Pajak Kendaraan Pemudahkan Dinas atau Kreditor Dinas atau Juhutan	- Jumlah Kendaraan Pemudahkan Dinas atau Kreditor Dinas Juhutan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	- 8 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Penelihuran Pendataan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Pendataan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 40 Unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Keg. Administrasi Kerjajangan Perangkat Daerah	Rp555,968,889	
Sub Keg. Penyelatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp555,960,000	
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp75,318,730	
Sub Keg. Penyelatan Komponen Instansi Lurik/Pemerintahan Daerah	Rp3,163,930	
Sub Keg. Penyelatan Peraturan dan Perlengkapan Kantor	Rp28,917,800	
Sub Keg. Penyelatan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp8,350,000	
Sub Keg. Fasilitasi Kerjajangan tata	Rp12,805,000	
Sub Keg. Penyelidikan Rapot Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp22,072,000	
Keg. Penyelatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp183,844,258	
Sub Keg. Penyelatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp161,944,258	
Sub Keg. Penyelatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp21,900,000	
Keg. Penelihuran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp172,420,880	
Sub Keg. Penelihuran Jasa Penelihuran, Biaya Penelihuran dan Pajak Kendaraan Pemudahkan Dinas atau Kreditor Dinas Juhutan	Rp81,020,000	
Sub Keg. Penelihuran Pendataan dan Mesin Lainnya	Rp91,400,000	

Pada, 20 Februari 2024
PIHAK PETAMA



Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Pengembangan Produk Industri-Pangan Dan Kesejahteraan
Bapak [Signature]
LORAN SUBU'U MANOPPO, SE
Nip. 197806222010011007